

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Sejarah Kabupaten Lombok Tengah

Kabupaten Lombok Tengah terbentuk menjadi otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 14 Agustus 1958. Namun demikian, sebelum terbentuk sebagai sebuah wilayah pemerintahan, entitas Lombok Tengah telah ada jauh sebelum itu. Beberapa momentum historis yang menandai keberadaan Lombok Tengah, antara lain adalah dengan dikeluarkan Stb Nomor 248 Tahun 1898, kemudian pasca proklamasi, Lombok Tengah secara integral menjadi bagian dari NKRI ditandai dengan pelantikan secara formal Kepala Pemerintahan Setempat Lombok Tengah yang pertama, pada tanggal 15 Oktober 1945. Momentum ini menjadi leverage factor yang memicu tumbuhnya semangat integrasi, patriotisme dan nasionalisme di Kabupaten Lombok Tengah. Enam momentum yang diklasifikasi menjadi dua kategori masa kejadian peristiwa penting perjalanan Kabupaten Lombok Tengah, yakni pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.⁴¹

Kabupaten Lombok Tengah dengan Kota Praya sebagai pusat pemerintahannya merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 1.208,39 km² (120.839 ha).

⁴¹ <http://lomboktengahkab.go.id/2013/05/20/serhloteng2/> Di akses Pada Tanggal 30 Juli 2017, Pukul 17:05

Nasional Gunung Rinjani berupa areal hutan. Curah hujan pada wilayah ini relatif tinggi dan merupakan wilayah tangkapan air yang menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain kawasan hutan, wilayah ini merupakan wilayah potensial pengembangan holtikultura dan wisata alam pegunungan dengan air terjun dan pemandangan yang indah serta udara yang sejuk.

Bagian tengah meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria dan sebagian Kecamatan Jonggat merupakan wilayah dataran rendah yang didominasi oleh hamparan lahan persawahan dengan potensi komoditas pertanian padi dan palawija

Bagian selatan merupakan daerah perbukitan kapur yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagian selatan ini meliputi wilayah Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur. Wilayah ini memiliki potensi wisata pantai yang indah dengan gelombang yang cukup fantastik. Wilayah ini merupakan kawasan strategis pengembangan pariwisata bahari.

B. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah

1. Gambaran Umum

Dalam PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa daerah memiliki alat kelengkapan daerah, salah satunya adalah dinas. Dinas tersebut kemudian dirumpukan menjadi beberapa dinas salah satunya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan dinas yang secara umum bertugas untuk mengembangkan potensi budaya

dan pariwisata yang ada di daerahnya guna mengembangkan potensi daerah, meningkatkan penerimaan daerah, serta dalam usaha pelestarian budaya daerah. Tugas-tugas dinas kebudayaan dan pariwisata secara khusus dan lebih spesifik diatur oleh ketetapan dari kepala daerah masing-masing.

Menurut Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 28 Tahun 2008 tentang rincian Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah merupakan unsur pelaksana bidang kebudayaan dan pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi DISBUDPAR Kabupaten Lombok Tengah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tertanggal 9 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 28 Tahun 2008 tertanggal 27 Agustus 2008 tentang rincian Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.⁴²

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah

PNS (Pegawai Negeri Sipil)	PPT (Pegawai Tidak Tetap)
21 Orang	29 Orang
Jumlah : 50 Orang Pegawai	

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 50 (lima puluh) orang terdiri dari Pegawai

⁴² Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tertanggal 9 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Negeri Sipil (PNS) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan PNS di Kabupaten Lombok Tengah

No.	Uraian Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	-
	SMP	-
	SMA/SMU	5 Orang
	S1	9 Orang
	S2	7 Orang
2.	Peringkat/Golongan	Jumlah
	III	15 Orang
	IV	6 Orang

Tingkat pendidikan PNS adalah dengan kualifikasi berpendidikan S2 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 9 orang dan SMU sebanyak 5 orang. Sesuai dengan pangkat/golongan didominasi oleh pangkat/golongan III sebanyak 15 orang, pangkat/golongan IV sebanyak 6 orang.⁴³

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di dukung oleh Aparatur dengan kemampuan dan keterampilan yang relatif memadai.

Adapun detail Tugas dan Tupoksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, adalah sebagai berikut :

a. Bidang Kebudayaan

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menyusun kebijakan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis penyelenggaraan bidang Kebudayaan.

Fungsi

⁴³Rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan Kinerja bidang;
2. Pengkoordinasian penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;
3. Kebijakan teknis di bidang Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang Kebudayaan;
5. Pelaksanaan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi, dan perangkat Kerja daerah instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program//kegiatan di bidang Kebudayaan;
6. Perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan bidang Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pengkoordinasian Pengumpulan pengolahan dan analisa data di bidang Kebudayaan sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
9. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan di bidang Kebudayaan;
10. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Pelaksanaan koordinasi dengan dengan instansi/lembaga terkait pemberian penghargaan kepada Budayawan dan seniman yang telah berjasa membina Budaya Daerah serta penghargaan kepada tokoh yang berjasa terhadap pengembangan dan pengkayaan sejarah dan purbakalaan;
12. Pelaksanaan fasilitasi bantuan kepada kelompok/sanggar seni budaya dalam rangka Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang undangan;
13. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidangnya.

b. Bidang Pengembangan Pariwisata

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis penyelenggaraan pengembangan pariwisata.

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan pariwisata sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang pembinaan;

5. Pelaksanaan koordinasi informasi dan sinkronisasi dengan perangkat kerja daerah dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di bidang pengembangan pariwisata ;
6. Perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standarisasi, dan kriteria di bidang pengembangan pariwisata.
7. Pelaksanaan program/kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 - a. Pengkoordinasian, pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang pengembangan pariwisata sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan program / kegiatan;
 - b. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap masalah dan peluang inventasi dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pembangunan objek wisata daerah;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, dan pelayanan pemberian ijin usaha pariwisata di bidang pengembangan pariwisata
 - d. Pelaksanaan fasilitasi bantuan dan pengembangan untuk pemeliharaan objek dan daya tarik wisata;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yng dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Sumber Daya

Melaksanakan sebagian tugas Dinas kebudayaan dan pariwisata dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis terhadap program/kegiatan pelestarian, pengembangan sumber daya, dan penyelenggaraan bimbingan penyuluhan.

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang sumber daya;
5. Pelaksanaan koordinasi informasi dan sinkronisasi kerja dengan perangkat daerah dan instansi terkait rangka pelaksanaan program/kegiatan di bidang sumberdaya;
6. Pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pelestarian dan pengembangan sumberdaya serta bimbingan penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan, dan analisa data bidang sumberdaya sebagai bahan penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;

8. Pelaksanaan pengaturan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap program/kegiatan permasalahan pelestarian dan pengembangan sumberdaya serta bimbingan penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan di daerah;
9. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan seksi ;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

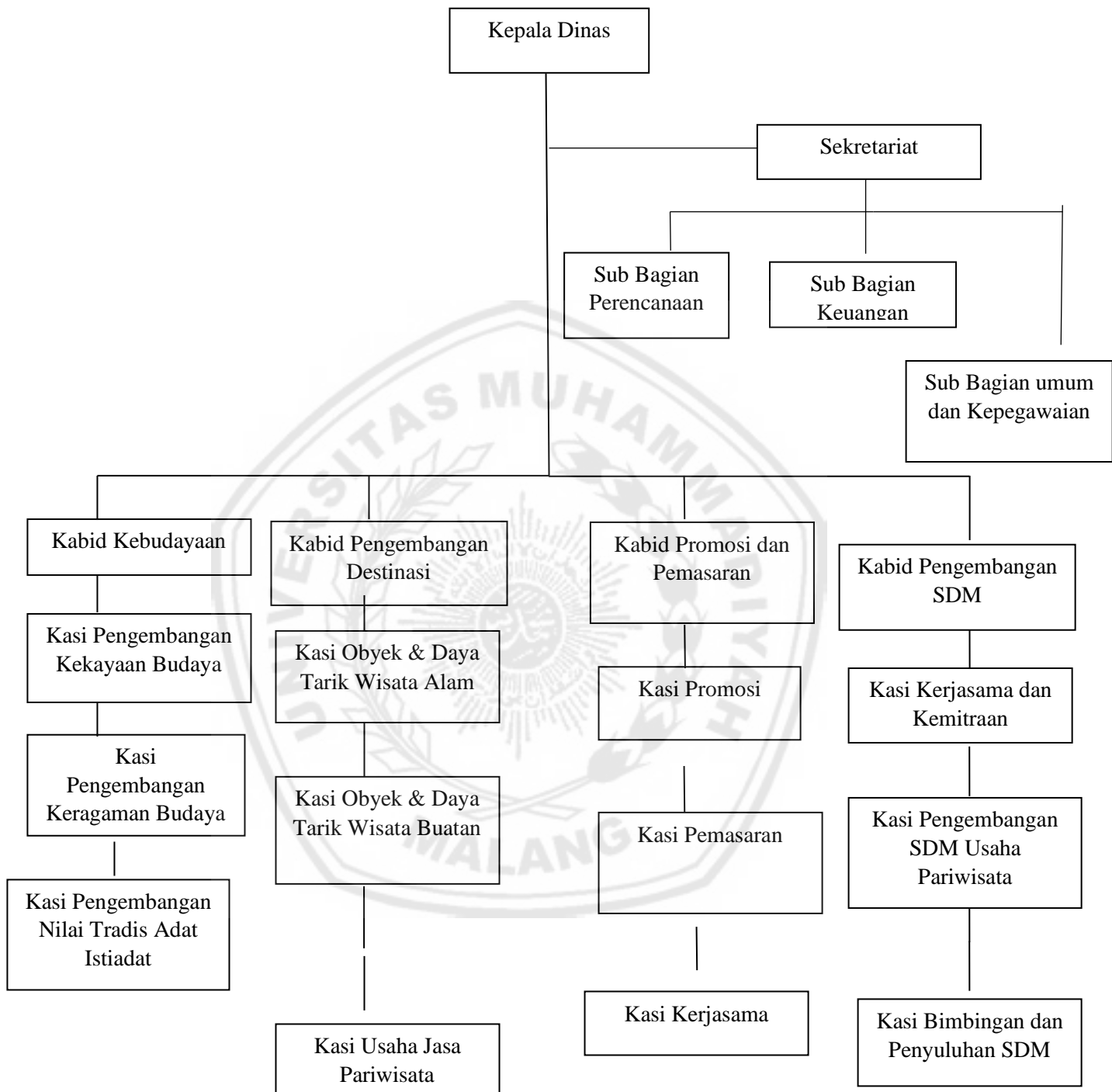
d. Bidang Pemasaran

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan Pemasaran Budaya dan pariwisata.

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang
2. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksaaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang pemasaran budaya dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang pembinaan pemasaran;
5. Pelaksanaan koordinasi informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat kerja Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di bidang pemasaran;
6. Perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran sesuai dengan perundang -undang yang berlaku;
7. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan, dan analisa data bidang pemasaran budaya dan pariwisata sebagai bahan penyusunan rencana evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
8. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan pemasaran dalam rangka pengembangan kepariwisataan daerah;
9. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasaran budaya dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemasaran;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai bidangnya.

C. Struktur Organisasi DISBUDPAR Kabupaten Lombok tengah



Gambar 3 Struktur Organisasi DISBUDPAR Kabupaten Lombok Tengah

Sumber : DISBUDPAR Kabupaten Lombok Tengah

Dari gambar 3.3 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Kebudayaan
- d. Bidang Pengembangan Destinasi
- e. Bidang Promosi dan Pemasaran
- f. Bidang Pengembangan SDM

DISBUDPAR Kabupaten Lombok Tengah merupakan unsur pelaksana dalam bidang kebudayaan, pariwisata. DISBUDPAR dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris dengan sub bagian yang terdiri dari sub bagian perencanaan, sub bagian keuangan, dan sub bagian umum dan kepegawaian yang akan menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam struktur organisasi DISBUDPAR Kabupaten Lombok Tengah terdapat bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari beberapa seksi dalam setiap bidang. Seksi-seksi tersebut yang dipimpin oleh Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidangnya masing-masing.

D. DESA SADE



Gambar 4 Desa wisata budaya Sade

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Desa Sade adalah salah satu desa, kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah. Desa Sade merupakan salah satu Desa Adat Suku Sasak, terletak persis di samping jalan raya Praya-Kuta, jaraknya 30 km dari Kota Mataram. Apabila menggunakan kendaraan, Desa Sade dapat ditempuh dalam waktu satu jam perjalanan.

Masyarakat Dusun Sade merupakan salah satu komunitas yang dianggap masih memegang unsur-unsur tradisi Suku Sasak sebagai suku asli pulau Lombok. Masyarakat Sade merupakan salah satu kolektivitas komunitas (Sasak:*Punggilan*) dari beberapa komunitas yang berasal dari wilayah Desa Rembitan seperti, Rembitan, Telok Bulan, Lentak, Selak, Penyalu, Peluk, Rebuk dan Rumbi. Namun dari semua keluarga besar yang mendiami wilayah Desa Rembitan tersebut berdasarkan asal usul sejarah dan budaya adalah bagian integral dari Sade itu sendiri.

Namun hanya desa Sade yang eksistensinya tetap diakui sebagai sebuah masyarakat tradisional yang teguh memegang adat tradisi nenek moyang. Dalam perkembangannya masyarakat Sade pun tidak lepas dari pengaruh modernisasi akibat tak kuasa mengelak dari pembangunan, yang menawarkan gemerincing rupiah serta interaksi yang intens dengan masyarakat sekitarnya dan wisatawan.

Berdasarkan data Statistik Kecamatan Pujut tahun 2011, Masyarakat Sade yang berada di wilayah Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah berjumlah sekitar 250 Kepala keluarga dengan jumlah penduduk 1150 jiwa yang tersebar di wilayah Sade Luar dan Sade Dalam. Sade Dalam saat ini memiliki penduduk sekitar 700 jiwa dengan 150 Kepala Keluarga, mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani serta memiliki tata kehidupan masyarakat yang teguh memegang tradisi adat.⁴⁴

Semenjak tahun 1975 desa ini sudah dikunjungi oleh para wisatawan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peningkatan jumlah wisatawan secara signifikan mulai terjadi semenjak diresmikannya penggunaan Bandara Internasional Lombok Praya pada bulan November tahun 2011. Hal ini disebabkan jarak tempuh dari Bandara ke Desa Sade hanya 15 – 20 menit perjalanan. Saat ini rata – rata pengunjung yang datang ke Desa ini setiap harinya mencapai 100 orang per hari. Untuk hari libur jumlah pengunjung dapat meningkat sampai dengan 200 orang.

Ada beberapa ciri dari desa Sade ini, yaitu :

⁴⁴ Statistik Kepariwisata Kabupaten Lombok Tengah 2016

1. Bale Tani merupakan rumah tinggal bagi masyarakat Sade yang terdiri dari dua lantai, berdinding anyaman bambu, beratap alang-alang dan berlantai campuran tanah dengan kotoran kerbau/sapi. Biasanya masyarakat mengepel rumahnya dengan kotoran kerbau/sapi 1 minggu sekali.
2. Bale Bonter adalah bangunan tradisional sasak yang umumnya dimiliki para pejabat desa, dusun/kampung. Bale Bonter digunakan sebagai tempat pesangkepan/persidangan atas, seperti tempat penyelesaian masalah pelanggaran hukum adat dan sebagainya.
3. Balai Kodong ini adalah rumah adat sasak yang ukurannya paling kecil, dibandingkan dengan rumah adat jenis lainnya. Bale Kodong pun bias digunakan oleh pasangan pengantin yang baru menikah, sebelum mereka akan membangun rumah baru yang lebih besar.
4. Lumbung berfungsi sebagai tempat penyimpanan, dimana bagian atasnya merupakan ruangan yang dapat dijadikan tempat menyimpan hasil panen atau perabotan rumah tangga masyarakat. Dibagian bawahnya, terdapat semacam serambi yang bisa digunakan sebagai tempat istirahat, atau sekedar duduk-duduk.

Keadaan sosial masyarakat Sade bisa dilihat dari jalan menuju rumah tetangga terlihat sempit dan hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki masyarakat Sade. Jarak rumah sangat padat sedangkan jalan desa hanya

merupakan jalan setapak yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan bermotor. Selain itu, adapula kebiasaan unik yang dilakukan oleh para ibu rumah tangga masyarakat sade, yaitu mengepel lantai rumah mereka menggunakan kotoran kerbau/sapi setiap seminggu sekali. Ini merupakan adat suku setempat yang mempunyai arti bahwa kerbau/sapi merupakan alat untuk kegiatan pekerjaan penduduk yang digunakan sehari-hari di sawah maupun lading, sehingga untuk menghormatinya, digunakan kotorannya sebagai penghormatan.

Keadaan sosial-ekonomi masyarakat Sade yaitu aktivitas menenun merupakan aktivitas yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Dan menenun adalah sumber penghasilan kedua mereka setelah bercocok tanam. Perempuan masyarakat sade merajut benang helai demi helai untuk dijadikan selendang, sarung, kain dan lainnya. Mayoritas perempuan dewasa masyarakat sade sangat piawai menenun dengan menggunakan alat tenun tradisional. Sebab sejak umur 10 tahun, mereka diajari cara menenun. Ada suatu filosofi atau tradisi yang dianut suku Sasak perempuan Sasak jika belum piawai menenun, maka perempuan tersebut secara adat belum boleh dinikahkan karena belum dianggap dewasa. Selain itu, adapun kegiatan *home industry* lainnya selain menenun yaitu membuat dan menjual berbagai aksesoris atau cinderamata khas desa Sade seperti, pernak-pernik berupa manik-manik, kalung, gelang dan lainnya.

Sistem kepercayaan masyarakat Sade sebagian besar masyarakatnya menganut agama Islam dan sebagian kecil dari mereka ada yang disebut dengan istilah “Islam Wektu Telu”. Islam wektu telu ini

terbentuk dari sejarah peninggalan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh 9 wali atau yang disebut dengan “Wali Songo” dari Jawa. Dimana pada saat itu Islam belum sempurna di sampaikan kepada penduduk suku Sasak khususnya masyarakat Sade.

Adat-istiadat yang ada di desa Sade terus dipertahankan hingga saat ini antara lain :

1. Bau Nyale

Bau Nyale merupakan sebuah peristiwa atau tradisi sakral yang sarat akan legenda yang melatar belakangi ritual tersebut. Dikisahkan, pada zaman dahulu hidup seorang putri yang cantik dan banyak di perebutkan oleh putra mahkota raja-raja di nusantara. Karena kecantikannya yang banyak menarik para putra mahkota untuk meminangnya hingga putri menjadi bingung untuk menerima atau menolaknya salah satu dari mereka. Bila salah satu pinangan ditolak maka tak pelak lagi pasti akan terjadi peperangan. Karena kebingunan dan kecemasan putri semua pinangan ditolak agar tidak terjadi peperangan, maka pada akhirnya putri memutuskan untuk menceburkan diri ke laut lepas, hingga akhirnya tewas dan kemudian menjelma sebagai cacing laut yang mendiami kawasan tersebut. Dasar kepercayaan inilah yang kemudian menjadi pijakan bagi suku Sasak untuk menyelenggarakan ritual Bau Nyale secara rutin tiap tahunnya. Bagi masyarakat Sasak Nyale digunakan untuk bermacam-macam keperluan

seperti santapan, di taburkan di tanah agar subur, lauk pauk, obat kuat dan lainnya yang bersifat magis sesuai keyakinan masing-masing.

2. Perisaian

Perisaian sebenarnya adalah sebuah tradisi yang digelar rutin tiap tahun oleh masyarakat suku Sasak dimana dalam perisaian diadakan pertarungan antar dua orang dengan bersenjata sebilah rotan, sedangkan perisai terbuat dari kulit kerbau. Setiap pemainnya dilengkapi dengan ikat kepala dan kain panjang. Perisaian sendiri pada awalnya adalah sebuah latihan perang para prajurit kerajaan di Lombok sebelum mereka menghadapi perang yang sesungguhnya di medan perang. Namun dalam perjalanannya perisaian ini kemudian berkembang menjadi tradisi Suku Sasak hingga saat ini.

3. Perang Ketupat

Upacara perang topat ini dilaksanakan oleh mereka yang berprofesi sebagai petani sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan dan sekaligus awal dari sebuah harapan akan berkah sang Pencipta agar tahun-tahun mendatang mereka diberi karunia hujan yang cukup, tanah yang subur untuk ditanami, dan panen yang berlimpah.

4. Tradisi Pernikahan

Penculikan merupakan tahap yang dilakukan sebelum laki-laki melamar calon pengantinnya. Biasanya laki-laki yang berencana akan menikah sudah berkompromi dengan si perempuan sebelum malamnya ia pergi menculik. Pihak laki-laki akan membawa perempuan kembali ke rumah orang tuanya keesokan harinya setelahnya untuk dilamar. Orang tua tidak bisa menolak anak perempuannya jika sudah berhasil diculik dan dikembalikan karena bisa dianggap sial (tidak ada yang melamar putrinya lagi di kemudian hari).

Pemerintah Provinsi NTB telah menunjuk Desa Sade sebagai Desa Wisata sesuai dengan SK Gubernur NTB No. 2 tahun 1989 tentang penetapan 15 kawasan pariwisata. Penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memiliki beberapa kriteria seperti :

- Memiliki atraksi wisata, yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia.
- Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi
- Sistem Kepercayaan dan kemasyarakatan, merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus atau kearifan lokal pada komunitas sebuah desa.
- Ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.
- memegang tradisi. erta para wisatawan yang datang ke desanya.

Memang tidak dapat dipungkiri, Desa Sade masih mempertahankan keaslian budaya suku Sasak demi kepentingan pariwisata. Tetapi dengan adanya label Desa Sade sebagai desa wisata, budaya suku Sasak di Desa Sade tetap dapat dinikmati dan dilestarikan sebagai bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Desa wisata budaya ini dilakukan untuk memperluas pengetahuan seseorang tentang budaya dengan mengadakan kunjungan untuk mempelajari untuk keadaan masyarakat, kebiasaan dan adat istiadat mereka.

Adapun tugas dari pemerintah dan masyarakat harus mempunyai unsur-unsur kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan, budaya dan kesejahteraan penduduk setempat. Jika hal tersebut dilakukan tentunya dapat memaksimalkan dan sekaligus melestarikan potensi sumber-sumber alam dan budaya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan yang berkesinambungan bagi penduduk setempat.